

Menjalin Demokrasi Lokal dengan Regional:
Membangun Indonesia, Membangun ASEAN

[Weaving Democratization on Local Level & Regional
Level: Building Indonesia, Building ASEAN]

Christine Susanna Tjhin

November 2005

Politics and Social Change Working Paper Series

<http://www.csis.or.id/papers/wps054>

This paper is a work in progress. Please do not quote without author's consent



The CSIS Working Paper Series is a means by which members of the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) research community can quickly disseminate their research findings and encourage exchanges of ideas. The author(s) welcome comments on the present form of this Working Paper. The views expressed here are those of the author(s) and should not be attributed to CSIS Jakarta.

Menjalin Demokrasi Lokal dengan Regional: Membangun Indonesia, Membangun
ASEAN [Weaving Democratization on Local Level and Regional Level: Building
Indonesia, Building ASEAN]

Christine Susanna Tjhin
CSIS Working Paper Series
WPS 054
November 2005

ABSTRACT

This paper was written for a presentation in the Millennium Seminar, in which over 60 civil society representatives from 32 provinces in Indonesia sat together to discuss matters relating to decentralization and how to develop Indonesia from the region. The paper highlights the significance of linking local dynamics in different parts of Indonesia dynamics with regional dynamics in Southeast Asia for the purpose of strengthening democratization process. Such significance is highlighted by the relations between local civil society network, in this case represented by the activity of Millennium Seminar, and regional civil society network, by the activity of ASEAN People's Assembly (APA). A particular initiative for this is the Democratization Assessment in Southeast Asia Program. This paper serves as reference paper for participants of Millennium Seminar to address issues of local governance during decentralization period using the Democratization Assessment in Southeast Asia initiative generated by APA.

Keywords: *Democratization, decentralization, regionalism, ASEAN, civil society, empowerment.*

Christine Susanna Tjhin
xtine@csis.or.id
Department of Politics and Social Change
CSIS Jakarta, Indonesia

MENJALIN DEMOKRASI LOKAL DENGAN REGIONAL:

Membangun Indonesia, Membangun ASEAN¹

ANTARA DESENTRALISASI DAN REGIONALISME²

Tema besar Millenium Seminar Kelima kali ini berkonsentrasi pada tema desentralisasi dan pembangunan Indonesia dari daerah. Dengan demikian, untuk apa sebenarnya kita bicara tentang Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)? Mengurus daerah saja sudah sulit, untuk apa kita memusingkan desa di Thailand, misalnya.

Krisis Asia adalah sebuah bukti pahit keterkaitan kita dengan tetangga kita di Asia Tenggara. Krisis ekonomi yang bermula di Thailand, merembet ke kawasan dan melukai Indonesia hingga terpuruk dalam krisis yang lebih dari sekedar krisis ekonomi. Di sisi lain, krisis multi-sektor di Indonesia juga mengancam stabilitas kawasan.

Dalam sebuah diskusi yang cukup panas, para pembicara dan peserta sebelumnya sudah bertukar pendapat mengenai resiko dan manfaat globalisasi – mungkin saat itu lebih merujuk pada konteks ekonomi. Yang perlu dicatat adalah masukan dari pembicara sebelumnya, Iman Sugema, yang telah meminta kita untuk membedakan fenomena globalisasi sebagai sebuah dinamika yang tidak bisa dihindari dengan kekuatan kapital yang memanipulasi struktur kekuasaan dalam proses tersebut.

¹ Makalah kerja ini disiapkan untuk Millennium Seminar Kelima, bertema ‘Membangun Indonesia dari Daerah’, yang diselenggarakan oleh CSIS di Hotel Lembah Hijau, Jawa Barat. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan oleh Yoanita Tahalele, peneliti magang dari Ohio State University atas bantuannya menyiapkan makalah ini, juga rekan-rekan di CSIS, terutama Departemen Politik dan Perubahan Sosial.

² Regionalisme dapat didefinisikan secara sederhana sebagai proses institusionalisasi dari interaksi antar negara dalam sebuah kawasan regional. Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (*Association of South East Asian Nations* atau ASEAN) merupakan satu-satunya institusi regional yang ada di Asia Tenggara, maupun Asia.

Regionalisme, yang menjadi fokus makalah ini, adalah salah satu upaya untuk menjawab tantangan globalisasi tersebut, di mana di saat yang bersamaan mengambil manfaat dari proses globalisasi tersebut. Dari sekian banyak arti penting regionalisme, beberapa pertimbangan politis adalah: (1) Keinginan untuk meningkatkan posisi tawar di panggung global; dan (2) Menjaga relasi anggota kawasan demi kemajuan dan stabilitas mengingat besarnya pengaruh kondisi dalam negeri setiap negara anggota kawasan.

Pengalaman program Penilaian Demokratisasi di Asia Tenggara (*Democratization Assessment in Southeast Asia Program*) yang akan penulis jabarkan nanti merupakan salah satu contoh bagaimana regionalisme bisa juga membawa dampak positif untuk upaya mendorong proses demokratisasi – terutama jika dikaitkan dengan interaksi masyarakat sipil yang melintasi batas negara.

Diskusi yang ingin dikembangkan dalam sesi ini, akan lebih banyak dikonsentrasikan pada institusionalisasi dinamika masyarakat sipil ASEAN, yang dalam hal ini dimanifestasikan ke dalam bentuk forum yang dinamakan Majelis Rakyat ASEAN (*ASEAN People's Assembly* atau APA).

Makalah ini akan memberikan gambaran perkembangan terakhir dalam ASEAN, sehubungan dengan elemen masyarakat sipil Asia Tenggara. Kemudian, makalah ini juga akan memperkenalkan salah satu inisiatif masyarakat sipil yang ditawarkan melalui sebuah forum masyarakat sipil regional, yang dikenal dengan sebutan ASEAN People's Assembly (APA), yang tujuan utamanya adalah mendorong pelebaran dan pendalaman proses demokratisasi. Pelebaran dalam arti melibatkan negara-negara di kawasan regional sedangkan pendalaman dalam arti melibatkan elemen-elemen daerah di negara yang bersangkutan. Pada akhirnya, makalah ini diharapkan bisa menjadi referensi awal untuk diskusi lebih lanjut mengenai inisiatif APA tersebut dan untuk kemungkinan mendorong inisiatif yang serupa di tataran nasional dan daerah.

ASEAN & RELEVANSINYA SAAT INI

Meski hampir 38 tahun telah berlalu semenjak ASEAN berdiri, masih dipertanyakan seberapa jauh ASEAN sebagai satu entitas telah menyentuh kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diambil di tataran regional. Di Indonesia saja misalnya, seberapa besar apresiasi publik terhadap kebijakan-kebijakan regional ASEAN? Bukan saja kebijakan itu tidak menyentuh, eksistensi ASEAN saja masih belum banyak dikenal oleh kebanyakan masyarakat Indonesia – terutama yang ada di daerah-daerah.

Refleksi ini tidak bermaksud untuk mengecilkan peran ASEAN selama ini. Dinamika kawasan Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari eksistensi ASEAN baik dari segi positif maupun negatif. Eksistensi 38 tahun saja sedikit banyak menunjukkan bahwa ASEAN masih memiliki makna bagi negara-negara Asia Tenggara. Tetapi makna ASEAN di mata masyarakat di seluruh kawasan pada umumnya, dan dengan masyarakat sipil pada khususnya, belum mendapatkan suatu bentuk yang kokoh ataupun jelas. Aspek inilah yang menjadi salah satu benang merah dari makalah ini.

Pada tanggal 7 Oktober 2003, sepuluh pemimpin negara anggota ASEAN berkumpul di Bali dan menyepakati, antara lain pembentukan sebuah Komunitas ASEAN yang dilandasi oleh 3 pilar – Komunitas Ekonomi, Komunitas Keamanan dan Komunitas Sosio-Budaya. Berpijak pada komitmen Deklarasi Bangkok 1967 dan Visi ASEAN 2020, Komunitas ASEAN yang akan dibangun oleh ASEAN adalah sebuah “Masyarakat yang Peduli” (*Caring Societies*) dan yang terikat oleh sebuah identitas bersama – identitas ASEAN.

Terlepas dari keindahan kosakata dalam dokumen Visi ASEAN 2020, realitas di Asia Tenggara membutuhkan sesuatu yang lebih. Perubahan situasi keamanan internasional – pergeseran dari paradigma ancaman tradisional (perang antar negara, dsb) menjadi non-tradisional (terorisme, konflik internal, kerusakan lingkungan, dll) – memberikan dampak riil terhadap situasi di kawasan

Asia Tenggara. Situasi-situasi terakhir menunjukkan tantangan-tantangan yang menuntut suatu mekanisme regional yang lebih efektif dan demokratis.

Semenjak awal berdirinya, ASEAN, yang lahir karena kebutuhan stabilitas politik kawasan, selalu percaya bahwa ada keterkaitan antara stabilitas regional dengan stabilitas nasional. Guncangan politik dalam negeri diyakini dapat mempengaruhi stabilitas kawasan. Hanya saja, cara penyelesaian yang dianggap paling tepat oleh pemerintah negara-negara anggota ASEAN adalah penyelesaian secara internal/nasional. Penyelesaian tersebut dianggap sebagai bagian dari proses pembangunan negara (*nation building process*).³

Di saat yang bersamaan, perkembangan politik di negara-negara anggota ASEAN terus bergulir bersamaan dengan perkembangan masyarakat sipil di negara-negara tersebut. Salah satu contoh dewasa ini adalah situasi politik di Myanmar yang dampaknya sangat dirasakan negara anggota ASEAN lainnya. Memburuknya situasi politik di Myanmar disebabkan oleh dominasi militeristik para junta yang telah melecehkan hasil pemilu demokratis yang memilih Aung San Suu Kyi.

Aliran pengungsi hanyalah salah satu dampak langsung yang dirasakan paling berat oleh Thailand. Ternodanya kredibilitas ASEAN di mata negara-negara partner akan menghambat kesempatan kerja sama yang akan meningkatkan pembangunan di kawasan. Masyarakat sipil dari dalam dan seputar Myanmar berupaya keras untuk mendorong proses demokratisasi. Proses-proses tersebut semakin memperkuat tuntutan reformasi ASEAN, yang selama ini dipandang bersembunyi di balik prinsip tidak turut campur (*non-interference principle*).

³ Rizal Sukma. 2004. *ASEAN, Keamanan Regional dan Peran Amerika Serikat: Sebuah Perspektif dari Asia Tenggara [ASEAN, Regional Security and the role of the United States]*. Makalah untuk seminar internasional IIPS di Tokyo, 30 November.

Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN dicanangkan pada pertemuan ke-37 para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta akhir Juni 2004, dan meliputi enam komponen utama:

- (1) Pembangunan politik (*political development*)
- (2) Pembentukan dan berbagi norma-norma (*shaping and sharing of norms*)
- (3) Pencegahan konflik (*conflict prevention*)
- (4) Resolusi konflik (*conflict resolution*)
- (5) Pembangunan perdamaian pasca-konflik (*post-conflict peace building*)
- (6) Mekanisme kelembagaan berdasarkan pembangunan politik yang adil, demokratik, dan harmonis.

Meskipun demikian, konsep Komunitas Keamanan ASEAN hingga saat ini masih merefleksikan cara pandang ke-dalam (*inward looking*) tersebut, terlepas dari pemikiran dan idealisme beberapa kalangan diplomat maupun intelektual di kawasan Asia Tenggara yang mensyaratkan demokrasi untuk stabilitas dan perdamaian kawasan.⁴

Di saat yang bersamaan, tantangan keamanan lintas-negara semakin mengental, terutama dalam hal ini ancaman terorisme. Ancaman ini melampaui permasalahan pemboman, tapi telah berdampak pada relasi antar komunitas di Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Friksi antar komunitas tersebut tidak hanya mengikis upaya reformasi politik dan keamanan, tetapi juga melemahkan upaya untuk melawan terorisme itu sendiri.

⁴ Lihat: “Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi ASEAN [*Strengthening ASEAN's pillars of democracy*]”, dalam *Manila Times*, 8 Oktober 2003; Jusuf Wanandi. “Kepemimpinan Indonesia Vital Saat ASEAN Memandang ke Depan [*Indonesian leadership vital as ASEAN looks to future*]”, dalam *The Jakarta Post*, 23 Juli 2004.

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat Asia Tenggara membutuhkan proaktifitas yang lebih meluas. Salah satu inisiatif yang ada mengambil bentuk sebuah forum masyarakat sipil ASEAN.

Majelis Rakyat ASEAN atau *ASEAN People's Assembly* (APA)

Majelis Rakyat ASEAN atau ASEAN People's Assembly (APA) adalah sebuah forum/jaringan masyarakat sipil yang membuka ruang bagi suara atau aspirasi masyarakat Asia Tenggara agar bisa mencapai para pemimpin negara-negara ASEAN. APA merupakan inisiatif dari ASEAN-ISIS, sebuah jaringan *think-tank* di tataran ASEAN yang selama ini telah secara aktif bekerja di tataran kebijakan nasional maupun regional – atau yang sering kali dikenal sebagai inisiatif Lintas Dua (*Track Two*).⁵

Meskipun telah aktif terlibat, beberapa tokoh dalam jaringan ASEAN-ISIS sangat merasakan bahwa proses kebijakan di ASEAN belum partisipatif secara optimal dan masih terbentang kesenjangan yang begitu luas antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Di satu sisi, Lintas Satu belum benar-benar responsif mengikutsertakan elemen-elemen masyarakat sipil di Asia Tenggara secara lebih luas, dan Lintas Dua masih belum secara efektif mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Kesenjangan tersebut semakin berpotensi untuk mengikis relevansi ASEAN bagi masyarakat Asia Tenggara. Untuk itulah ASEAN-ISIS mendorong terbentuknya APA dengan harapan agar kesenjangan tersebut dapat dihilangkan.⁶

⁵ Secara umum, di tataran hubungan regional, istilah Lintas Satu (*Track One*) merujuk pada jaringan relasi pemerintah. Lintas Dua merujuk pada jaringan relasi lembaga-lembaga yang aktif dalam proses rekomendasi kebijakan, dan Lintas Tiga (*Track Three*) dikaitkan dengan jaringan relasi lembaga-lembaga masyarakat sipil yang lebih meluas. Untuk informasi tambahan, kunjungi: www.csis.or.id/regpart_view.asp?id=2&tab=0. Lihat juga laporan-laporan APA, yaitu: *An ASEAN of the People by the People for the People: Report of the First ASEAN People's Assembly* (2001); *Challenges Facing the ASEAN Peoples: Report of the Second ASEAN People's Assembly* (2003); dan *Towards an ASEAN Community of Caring Societies: Report of the Third ASEAN People's Assembly* (2003).

⁶ Untuk gambaran lebih komprehensif, lihat: Jurgen Ruland. 2002. "Kontribusi Dialog Lintas Dua atas Pencegahan Konflik [*The Contribution of Track Two Dialogue towards Crisis Prevention*]", dalam *ASIEN*; dan Pauline Kerr. 1994. "Dialog Keamanan di Asia Pasifik [*The Security Dialogue in the Asia-Pacific*]", dalam *The Pacific Review*. Vol. 7. No. 4. Hal. 397-409.

Terlepas dari dukungan Sekretariat ASEAN dalam proses ini, pembentukan APA tidak mendapatkan dukungan dari Yayasan ASEAN. Dualisme seperti ini sedikit banyak memberikan gambaran sejauh mana ASEAN sebagai sebuah entitas mau dan/atau mampu mendorong kerjasama regional yang lebih komprehensif. Meskipun dualisme dan keengganan terus eksis, tidak ada satupun yang bisa menyangkal pentingnya elemen masyarakat sipil dalam proses kebijakan regional.

APA pertama kali terselenggara di Batam, Indonesia tanggal 24-26 November 2000. APA kedua diadakan di Sanur, Bali pada tanggal 30 Agustus-1 September 2002. Lebih dari 300 peserta dari kawasan Asia Tenggara dan negara-negara lainnya hadir untuk membicarakan isu-isu strategis di kawasan. Kota Manila, Filipina adalah tempat diadakannya APA ketiga (25-27 September 2003) dan APA keempat (10-13 Mei 2005) di mana sekitar 250 perwakilan LSM, akademika, dan lembaga kemasyarakatan lainnya bertukar pikiran, pengetahuan dan pengalaman untuk kemajuan di kawasan Asia Tenggara.

Sebuah Rencana Aksi APA dicanangkan pada pertemuan kedua di Sanur Bali, dan salah satu dari rencana aksi tersebut adalah dibuatnya sebuah *Penilaian Demokratisasi di Asia Tenggara* untuk Asia Tenggara demi mendorong proses demokratisasi di kawasan yang beragam tersebut.

Tujuan umum dari Program *Penilaian Demokratisasi di Asia Tenggara* sebagaimana dicanangkan dalam pertemuan tersebut adalah untuk menjadi katalis dari inisiatif pemberdayaan regional yang komprehensif yang sifatnya berkesinambungan. Dari diskusi-diskusi yang berkembang sepanjang pertemuan, kerangka kerja penilaian demokratisasi ini diharapkan dapat menjadi:

- Sebuah standar yang memungkinkan adanya perbandingan praktek demokrasi di negara-negara anggota ASEAN, terutama negara-negara yang mengklaim sebagai negara demokratis.

- Sebuah instrumen pendukung advokasi kelompok masyarakat sipil di kawasan Asia Tenggara yang berupaya mendorong sikap responsif pemerintah atas tuntutan masyarakat.
- Sebuah alat untuk mendukung dan memperkuat kegiatan berjaringan di antara beragam advokat demokrasi melalui agenda yang disepakati bersama dan dibuat secara lebih jelas.
- Sebuah kontribusi konseptual yang sekiranya dapat dimanfaatkan oleh para advokat demokrasi di kawasan Asia Tenggara dalam menjalankan mandat mereka.
- Sebuah arahan untuk pembuatan kebijakan dan intervensi pejabat pemerintah yang pro demokrasi.
- Sebuah kontribusi intelektual untuk memperkaya literatur akademik seputar demokrasi di kawasan Asia Tenggara.

Kesempatan dalam Millenium Seminar Kelima ini dipergunakan untuk mensosialisasikan program ini, menggali pengalaman-pengalaman daerah yang relevan dengan indikator-indikator yang telah dibuat, dan mengeksplorasi kemungkinan menguji coba kerangka kerja yang diajukan dari kelompok kerja regional di tataran daerah.

Kampanye Hak Asasi Manusia (HAM) regional untuk kasus Myanmar, Aceh, Timor Timur dan Papua misalnya adalah contoh konkrit gerakan masyarakat sipil yang melintasi batas nasional. Meskipun tidak selalu mendatangkan solusi yang instan, kampanye regional membangun opini publik dan simpati di kawasan atas wilayah-wilayah yang dirundung permasalahan.

APA pun menjadi salah satu forum untuk mengekspresikan aspirasi masyarakat Asia Tenggara sambil menciptakan tekanan kepada pemerintah negara ASEAN. Tidak jarang, pemerintah negara yang bermasalah merasa jengah dengan tekanan masyarakat sipil tingkat regional ini. Di saat yang bersamaan, pemberdayaan masyarakat sipil menjadi proses alamiah yang bergulir sepanjang pergerakan tersebut eksis. Pertukaran pengalaman dan strategi, maupun kerjasama yang terjalin

antara aktor masyarakat sipil di negara yang berbeda menjadi sebuah proses penting bagi demokratisasi itu sendiri.

PRINSIP-PRINSIP DASAR, METODOLOGI, KERANGKA KERJA & INDIKATOR⁷

Ada seperangkat prinsip-prinsip dasar (lihat Tabel 1. Prinsip-prinsip Demokrasi) yang diterima sebagai seperangkat aturan main bersama dalam upaya melakukan penilaian proses demokratisasi di kawasan Asia Tenggara, terlepas dari begitu banyak perdebatan retorik antara demokrasi universal dan partikular, antara konsep “Barat” dan “Timur” atau “Cara Asia/ASEAN”⁸ dan berbagai macam kata sifat yang tercantum di depan definisi demokrasi saat digunakan untuk menggambarkan karakteristik demokratis sebuah negara⁹ – seperti: semi-demokrasi, demokrasi iliberal, demokrasi elektoral, dll.

Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi dasar dari perkembangan institusional dan proses demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, inklusif, representasi, transparansi, akuntabilitas, responsif, kompetisi yang bebas dan adil, dan solidaritas.

Kerangka kerja yang dibuat mengambil inspirasi dari dua konsep utama yang dikembangkan oleh David Beetham dalam membuat indikator demokrasi untuk IDEA International. Beetham menerjemahkan “kedaulatan rakyat” (*rule of the people*) secara lebih spesifik menjadi faktor kontrol populer (popular control) dan faktor kesetaraan politik (*political equality*). Kontrol populer

⁷ Bagian ini mengolah kembali makalah kerja yang pernah dipresentasikan di APA 2003. Christine Susanna Tjhin, Aries A. Arugay, dan Herman Joseph S. Kraft. 2003. “Menilai Demokratisasi di Asia Tenggara: Menuju Pemberdayaan Akar Rumput Regional [Assessing Democratization in Southeast Asia: Towards Regional Grassroots Empowerment]. CSIS Working paper. www.csis.or.id/publications_paper_view.asp?id=44&tab=0.

⁸ Akio Kawato. 1995. “Melampaui Mitos ‘Nilai-Nilai Asia’ [Beyond the Myth of ‘Asian Values’]”, dalam Chuokoron; Seok-Hyeon Kim. 1999. “Penilaian Kritis atas Nilai Asia dan Model Asia [A Critical Review of Asian Value and Asian Model]”. Makalah kerja yang tidak diterbitkan; Steven J. Hood. 1998. “Mitos Demokrasi Gaya Asia [The Myth of Asian-Style Democracy]”, dalam *Asian Survey*. Vol. 38. No. 9; Stephanie Lawson. 1995. “Budaya, Relativisme dan Demokrasi: Mitos Politis tentang ‘Asia’ dan ‘Barat’ [Culture, Relativism and Democracy: Political Myths about ‘Asia’ and the ‘West’]”. Makalah kerja yang tidak dipublikasikan.

⁹ David Collier dan Steven Levitsky. 1997. “Demokrasi dengan Kata Sifat: Inovasi Konseptual dalam Penelitian Komparatif [Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research]”, dalam *World Politics*. Vol. 49. No. 3.

memanifestasikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan publik dan para pembuat kebijakan. Perlakuan terhadap masyarakat harus didasari pada keyakinan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan rasa hormat yang setara. Setiap orang memiliki kapasitas yang setara dalam menentukan pilihan. Pilihan tersebut dapat mempengaruhi keputusan kolektif dan semua kepentingan yang mendasari pilihan tersebut harus diperhatikan.¹⁰

Kerangka kerja utama dibagi menjadi 3 *komponen utama*. Pertama, **Kerangka Kerja Hak-hak Warganegara yang Kesetaraannya Terjamin** (*Guaranteed Framework of Equal Citizen Rights*). Termasuk di dalamnya adalah akses kepada keadilan dan supremasi hukum, juga kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, dan hak-hak dasar yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh/menjalankan hak-haknya secara efektif.

Komponen Pertama terdiri dari 2 *tema*, yaitu:

1. Kewarganegaraan yang Setara (*Common Citizenship*)
2. Hak-hak Sipil dan Politik (*Civil and Political Rights*)

Kedua, **Institusi-institusi Pemerintah yang Representatif dan Akuntabel** (*Institutions of Representative and Accountable Government*). Tercakup di dalamnya adalah pemilu yang bebas dan adil yang menyediakan perangkat agar pilihan dan kontrol populer atas pemerintah dapat dilaksanakan. Termasuk juga di dalamnya adalah prosedur-prosedur yang menjamin akuntabilitas pejabat publik (yang dipilih maupun tidak dipilih melalui pemilu).

Komponen Kedua terdiri dari 6 *tema*, antara lain:

1. Pemilu yang Bebas dan Adil (*Free and Fair Elections*)
2. Partai Politik yang Demokratis (*Democratic Political Parties*)

¹⁰ David Beetham. 1994. "Prinsip dan Arahan Kunci untuk Audit Demokratis [*Key Principles and Indices for a Democratic Audit*]", dalam *Defining and Measuring Democracy*. London: Sage Publications.

3. Hubungan Sipil-Militer (*Civil-Military Relations*)
4. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (*Governmental Transparency and Accountability*)
5. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)
6. Desentralisasi (*Decentralization*)

Dan Komponen Ketiga adalah **Masyarakat yang Demokratis atau Sipil** (*Civil or Democratic Society*). Cakupan komponen ini meliputi media komunikasi, asosiasi-asosiasi sipil, proses-proses konsultatif dan forum-forum lainnya yang bebas dan pluralistik. Kebebasan dan pluralisme tersebut harus menjamin partisipasi populer dalam setiap proses politik dalam rangka mendorong sikap responsif pemerintah terhadap opini publik dan terselenggaranya pelayanan publik yang lebih efektif.

Komponen ketiga mencakup 2 tema, yaitu:

1. Media yang Independen dan Bebas (*Independent and Free Media*)
2. Partisipasi Populer (*Popular Participation*)

Setiap 10 tema yang ada berisikan seperangkat indikator penilaian yang dikategorikan berdasarkan 3 dimensi, yaitu dimensi legal, institusional dan kinerja (*performance*). *Dimensi legal* adalah untuk mengidentifikasi kehadiran payung hukum yang memberikan kepastian hukum untuk tema yang terkait. *Dimensi institusional* menggali ada atau tidaknya perangkat institusi dan mekanisme yang mampu memberikan jaminan implementasi perangkat hukum. *Dimensi kinerja* mengelaborasi sejauh mana kinerja elemen-elemen dalam dua dimensi sebelumnya telah berhasil membawa pengaruh aktual terhadap kemajuan proses demokratisasi berdasarkan konteks tema yang terkait. Indikator-indikator dalam setiap dimensi tersebut diharapkan bisa menjadi semacam petunjuk-petunjuk praktis dalam proses penilaian demokratisasi. (Lihat Tabel 2. Matriks Indikator terlampir).

PROSES KELOMPOK KERJA REGIONAL

Program *Penilaian Demokratisasi di Asia Tenggara* ini dikoordinasikan oleh CSIS, Indonesia, bersama dengan satu program lain, yaitu *Gender Scorecard*. Pada APA ketiga, sebuah Kelompok Kerja Regional yang beranggotakan peneliti dan akademika dari CSIS Indonesia, dan *Institute for Strategic and Development Studies* (ISDS) Filipina mencoba untuk membuat sebuah kerangka kerja dan metodologi untuk program ini.

Pada tahapan awal pembuatan kerangka kerja dan metodologi, Pokja Regional mengadakan beberapa pertemuan di Jakarta dan Manila dengan mengundang perwakilan dari LSM, sektor akademika, partai politik dan pemerintahan. Proses ini dirasa sangat bermanfaat dalam proses pembuatan indikator-indikator demokrasi. Input-input kritis yang diperoleh dari diskusi ini termasuk debat seputar konsep, definisi dan prinsip demokratisasi, juga konteks-konteks nasional yang dianggap relevan berdasarkan indikator-indikator yang ditawarkan. Usulan untuk memasukkan tema-tema seputar sektor ekonomi, sosial dan hubungan internasional muncul dalam setiap pertemuan. Hasil dari pertemuan tersebut diolah kembali untuk kemudian dipresentasikan di Manila dalam pertemuan APA ke-tiga. Untuk tahap ini, hanya 6 tema yang diuji-coba.

Tahapan berikutnya di tahun 2004 adalah mencoba untuk mengaplikasikan kerangka kerja dan indikator secara lebih lengkap (melibatkan 10 tema) dan strategis (fokus langsung pada situasi-situasi yang mengilustrasikan *kemajuan*, *stagnasi* dan *kemunduran*, untuk kemudian mengusulkan agenda aksi masyarakat sipil yang spesifik). Untuk saat ini, uji coba bersama anggota dari Malaysia dan Thailand pun sedang diupayakan.

Pada akhirnya adalah sebuah narasi/laporan tertulis yang lebih mendetil. Periode kasus Indonesia diambil seputar akhir 2003 hingga Mei 2005. Titik berat penilaian yang nampak dalam tabel

tersebut terdapat pada tema-tema berikut: Pemilu yang Bebas dan Adil, Partai Politik yang Demokratis, dan Hubungan Sipil-Militer.

Secara umum, proses demokratisasi bergerak relatif maju namun itu pun lebih banyak didorong oleh keteguhan sebagian dari masyarakat sipil melalui **Partisipasi Populer & Media yang relatif bebas tapi tidak sepenuhnya independen**. Ancaman terbesar datang dari **Partai Politik yang tidak demokratis, Pemerintahan yang tidak transparan & akuntabel**; juga **Inferioritas Sipil & Ambisi Militer**. Kita bisa melihat bentuk demokrasi prosedural yang relatif cukup baik selama **Pemilu 2004** (pengecualian pada kredibilitas KPU dan partai politik) dan mencatat tantangan besar **PILKADA**. Relatif tidak ada kemajuan berarti untuk situasi seputar tema **Kewarganegaraan yang Setara**. Namun kita melihat kemunduran besar dalam konteks **Hak-hak Sipil & Politik**. Proses-proses dalam **Supremasi Hukum masih berjuang**, tetapi tetap terkontaminasi korupsi. **Desentralisasi** sudah menjadi terhentikan dengan hasil yang beragam di pelbagai wilayah di Indonesia, meskipun tercatat upaya-upaya resentralisasi.

CATATAN PENUTUP

Sebagai catatan penutup, perlu ditekankan bahwa metodologi, kerangka kerja dan indikator yang telah dihasilkan maupun penilaian situasi demokratisasi yang diajukan dari proses APA selama ini tentunya masih jauh dari sempurna. Kekurangan ataupun kelebihan yang ada tidak lepas dari karakteristik pelaku aktif program penilaian demokrasi yang ada. Sejauh ini, program ini masih dimotori oleh beberapa lembaga *think-tank* dan kelompok akademia saja.

Sehingga, jika direfleksikan lebih jauh, hasil kerja selama ini dirasa relatif bermanfaat untuk debat akademik publik. Pelaku-pelaku tersebut berkapasitas relatif lebih spesifik dalam menggunakan “bahasa akademik-kebijakan”.

Tetapi salah satu kelemahan mendasar dari pelaku aktif adalah kelemahan dalam kapasitas advokasi dan perumusan agenda aksi yang strategis. Selain itu, penjabaran atas pengalaman-pengalaman di daerah masih sangat minim, mengingat program yang masih muda usia ini belum banyak disosialisasikan ke daerah di luar Jakarta.

Satu hal, perlu diingat bahwa inisiatif ini bersifat regional, sehingga konteks pembuatan kerangka kerja, indikator, dan hal lainnya mengambil referensi dari situasi regional. Dengan kata lain, kontekstualisasi terhadap situasi khusus di tataran nasional dan daerah menjadi prioritas penting.

Sebagai refleksi untuk masa yang akan datang, dalam konteks dinamika ASEAN, kepemimpinan Indonesia seringkali dipandang sebagai sesuatu yang “alamiah”. Pertimbangannya antara lain dengan aspek geografis (luas daerah), strategis (di antara dua benua dan dua samudra), demografi (jumlah penduduk terbesar), dan politis (‘kesuksesan’ Pemilu Langsung 2004 yang dari segi skala pelaksanaan merupakan yang terbesar di Asia Tenggara).

Di tataran masyarakat sipil, Indonesia pun sebenarnya bisa menjadi motor penggerak regional, mengingat begitu banyak inisiatif sudah dilakukan oleh LSM-LSM lokal, seperti kerja besar yang sudah dilakukan oleh, antara lain: DEMOS dan YAPPIKA. Semakin dalam partisipasi elemen masyarakat sipil dalam program ini, semakin signifikan pula kontribusi yang bisa diwujudkan.

Yang lebih penting lagi, adalah kehadiran para peserta Millennium Seminar yang bisa menjadi pelaku aktif dalam program ini. Anda sekalian yang telah aktif berkarya di wilayah anda masing-masing, memiliki kekayaan pengetahuan dan pengalaman daerah yang bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita sendiri maupun kolega-kolega kita di kawasan regional.

Dalam diskusi kelompok yang penulis ikut fasilitasi kemarin, pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh peserta seputar penadbiran lokal (*local governance*) – baik di Purwokerto, Gorontalo, maupun Papua – sangat relevan dengan tiga tema dalam matriks – Desentralisasi (seputar mekanisme hubungan pemerintah kabupaten dengan desa); Partisipasi populer (pelibatan masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan untuk desa dan kabupaten); dan Transparansi & akuntabilitas pemerintahan (akses masyarakat desa ke pemerintah daerah).

Untuk itu, penulis berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba mengkontekstualisasikan kerangka kerja dan matriks yang diajukan dalam APA dengan situasi-situasi yang ada di wilayah masing-masing. Masukan ataupun kritik seputar kerangka kerja yang ada pun akan dihargai dan nantinya akan disampaikan ke kolega-kolega di kawasan Asia Tenggara melalui forum APA. Bahkan, mungkin sebagian dari para peserta Millenium bisa ikut berpartisipasi dalam forum APA tersebut dan ikut membangun jaringan regional secara langsung.

LAMPIRAN Tabel 1. Prinsip-prinsip Demokrasi

Nilai2 Terkandung	DESKRIPSI
Partisipasi (<i>Participation</i>)	Demokrasi pd esensinya melibatkan aspirasi masyarakat dlm menjalankan perannya secara aktif & menentukan dlm proses politik. Partisipasi adalah elemen penting dlm pemberdayaan. Partisipasi tidak hanya berupa 'mencoblos' dlm pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yg dilaksanakan secara rutin. Partisipasi menjamin keterlibatan dlm proses Kebijakan, baik dg melibatkan LSM, partai politik, maupun jalur-jalur lain. Tetapi, semua ini harus didasarkan pada asumsi bahwa hak-hak utk berpartisipasi itu memang sudah eksis & masyarakat/warganegara memiliki kapasitas & sumber2 daya yg layak utk berpartisipasi, & pemerintah telah menyediakan jalur2 & institusi2 politik (di mana melalui semua itu masyarakat bisa berpartisipasi).
Inklusivitas/Pe libatan (<i>Inclusion</i>)	Setiap individu dipandang setara secara politik. Dengan kata lain setiap individu diperlakukan sebagai warganegara terlepas dari perbedaan latar belakang ras, etnis, kelas, gender, agama, bahasa, maupun identitas lain. Demokrasi mendorong pluralitas & keberagaman, juga mengelola keberagaman tsb tanpa kekerasan. Demokrasi tidak bisa eksis jika perolehan hak2 dasar dibatasi secara diskriminatif. Demokrasi juga harus mengawal sektor2 masyarakat yg termarginalisasi melalui pelaksanaan kebijakan afirmatif utk bisa mencapai kesamaan status & pemberdayaan. Kebijakan afirmatif ini haruslah bebas dari prasangka/stereotip.
Perwakilan/R epresen-tasi (<i>Representation</i>)	Dengan mempertimbangkan bahwa partisipasi langsung dlm setiap proses pemerintahan tidak bisa dilakukan secara absolut mengingat keterbatasan waktu & ruang, jalur yg paling rasional adalah dengan menyediakan perangkat utk representasi/perwakilan. Mereka yg telah mendapatkan mandat utk menjalankan aspirasi populer harus mampu mewakili konstituensi mereka. Institusi2 harus pula mencerminkan komposisi sosial dari para pemilih – baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Terlebih lagi, mereka harus mewakili arus utama dari opini publik.
Transpa-ransi (<i>Transparency</i>)	Karena demokrasi berarti bahwa institusi2 publik mendapatkan otoritas mereka dari masyarakat, maka harus ada perangkat yg memungkinkan masyarakat utk mengawasi & mengawal institusi2 publik tsb. Masyarakat atau kelompok yg ditunjuk oleh masyarakat harus diberikan kesempatan utk mempertanyakan kinerja & kerja institusi2 publik tsb. Terlebih lagi, segala informasi mengenai proses kerja & kinerja mereka harus bisa dijangkau oleh publik & media massa.
Prtanggung-jawaban/ Akuntabili-tas (<i>Accountability</i>)	Pertanggungjawaban/akuntabilitas hanya akan mungkin jika institusi2 negara/publik itu transparan & terbuka. Akuntabilitas sangatlah penting dlm demokrasi karena hal inilah yg akan menjamin agar wakil2 rakyat yg memegang mandat populer tidak menyimpang dari jalur mandat & fungsi mereka. Akuntabilitas mengharuskan wakil2 rakyat tsb bertanggungjawab atas sikap & perbuatan mereka, & jika sampai terjadi penyimpangan, penjatuhan sanksi kepada pihak2 yg bertanggungjawab harus menjadi bagian dari akuntabilitas ini.
Kecepatan merespon (<i>Responsiveness</i>)	Dlm demokrasi, institusi2 publik/negara harus dapat diakses oleh kelompok2 masyarakat yg berbeda. Institusi2 ini harus siap utk merespon tuntutan2 warganegara dlm setiap proses pembuatan kebijakan secara cepat & bijak. Kemampuan institusi2 tsb dlm mengantarkan pelayanan (<i>service delivery</i>) menunjukkan kualitas dari institusi2 tsb & pada akhirnya, kualitas dari demokrasi itu sendiri.
Kompetisi/ Otorisasi (<i>Competition/Authorization</i>)	Demokrasi juga merupakan sebuah sistem di mana partai politik bertarung dlm proses pemilihan. Setiap blok partai politik diberikan kesempatan yg setara utk mengelola diri secara bebas & adil dlm proses yg kompetitif. Selain itu, hasil2 dari proses2 ini tidak akan mendapatkan legitimasi jika tidak semua orang menerimanya. Maka dari itu, sistem kompetisi ini harus mengandung kondisi dimana warganegara diberikan pilihan2 kandidat wakil rakyat yg berkualitas dengan program2 yg layak dipilih.
Solidaritas (<i>Solidarity</i>)	Rejim demokratis harus bisa bersandar pada dukungan & niat baik dari negara2 lain yg juga demokratis. Thesis "Demokrasi damai" (<i>democratic peace</i>) mengklaim bahwa gabungan negara2 demokratis bisa membentuk komunitas bangsa yg cinta damai. Solidaritas dapat menemukan ekspresinya saat sebuah demokrasi menjunjung prinsip2, norma2, & aturan2 hukum yg disepakati oleh insitusi2 multilateral. Terlebih dari itu, solidaritas harus pula mencerminkan dukungan thd pergulatan demokratis di negara2 lain.

LAMPIRAN Tabel 2. MATRIKS INDIKATOR

CMP	TEMA	DIMENSI LEGAL	DIMENSI INSTITUSIONAL	DIMENSI KINERJA
Kerangka Kerja Hak-hak Warganegara yg Kesetaraannya Terjamin	Kewarga-negaraan yg Setara	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan atas kewarganegaraan yg setara & universal, juga masyarakat yg plural (sehubungan dengan perihal etnisitas, agama, ras, gender, kelas, status sosial, dll). Adanya pengakuan status kelompok2 minoritas/ termarginalisasi. Jaminan adanya upaya resolusi damai utk konflik2 komunal. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya institusi2 yg relevan dan/atau mekanisme2 utk menangani permasalahan kelompok2 minoritas/termarginal dlm masyarakat yg plural (sehubungan dg e/a/r/g/k/ss, dll). Terbentuknya mekanisme2 utk menyelesaikan konflik2 komunal. 	<ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana konflik2 komunal & kekerasan terjadi & diselesaikan. Sejauh mana diskriminasi terjadi atas kel2 minoritas/termarginal. Sejauh mana status khusus diberikan utk kasus2 khusus yg berkaitan dg kel2 minoritas/termarginal.
	Hak-hak Sipil & Politik	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perlindungan thd warganegara dari kekerasan politik & pelanggaran fisik atas individu. Jaminan atas kebebasan berekspresi. Jaminan atas kebebasan berserikat & berkumpul. Ratifikasi Konvensi International Hak2 Sipil & Politik (ICCPR). 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya Komisi HAM independen. Terbentuknya kantor publik pembela HAM. 	<ul style="list-style-type: none"> Efektivitas Komisi HAM dlm mengawasi perkembangan penghormatan HAM. Jumlah & lingkup pembunuhan politik (<i>extra-judicial killings</i>). Jumlah & lingkup kekerasan aparat keamanan. Sejauh mana sensor terjadi.
Institusi2 Pemerintah yg Representatif & Akuntabel (1)	Pemilu yg Bebas & Adil	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan atas adanya pemilihan umum/kepala daerah sebagai mekanisme utama utk peralihan kekuasaan dari warganegara ke pemimpin. Jaminan atas hak utk memilih bagi warganegara yg telah dewasa scr universal. Jaminan atas akses & keterbukaan dlm pemilihan umum/kepala daerah bagi kekuatan2 politik yg berbeda. Jaminan atas keterwakilan dlm Parlemen (berkaitan dg e/a/r/g/k/ss, dll). 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya otoritas elektoral (KPU/D) yg mengatur & mengawasi pelaksanaan pemilihan yg bebas & adil. Imparsialitas dr otoritas elektoral thd berbagai kandidat & partai2. Integritas dr proses pemilihan yg menjamin keterwakilan & transparansi. 	<ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana terjadi protes2 atau tuntutan atas pemilihan. Jumlah pemilih yg memilih (<i>voter turnout</i>). Keberagaman & lingkup pilihan yg tersedia merefleksikan perbedaan/pertentangan2 politik (<i>political cleavages</i>). Sejauh mana terjadi kekerasan & penipuan dlm pemilihan.
	Partai Politik (PP) yg Demokratis	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan atas independensi PP dr intervensi & control negara. Adanya pendanaan negara utk PP Adanya aturan2 hukum utk PP agar tdpt proses internal yg demokratis, prosedur2 legal & keterwakilan dlm PP (berkaitan dg e/a/r/g/k/ss, dll). Adanya aturan2 hukum ttg PP yg memupuk disiplin & akuntabilitas antara pejabat partai & anggota. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya sistem partai yg stabil & representatif. Kefektifan PP dlm mewakili konstituen mereka. Kapasitas utk mengekspansi fungsi & konstituen mereka. Adanya program2/platform2 yg jelas & akuntabel. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentasi PP yg layak dr suara nasional utk eksekutif & legislatif. Perubahan signifikan dlm pemerintahan melalui perubahan komposisi PP.

Bagian ini merupakan versi original dari hasil penilaian kelompok kerja 2004.

CMP	TEMA	DIMENSI LEGAL	DIMENSI INSTITUSIONAL	DIMENSI KINERJA
Institusi² Pemerintah yg Representatif & Akuntabel (2)	Hubungan Sipil-Militer	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan atas supremasi sipil atas militer. Jaminan adanya insulasi militer atas birokrasi sipil. Jaminan atas akuntabilitas militer utk menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kepemimpinan sipil dlm lembaga pertahanan dengan otoritas atas kebijakan pertahanan & pembuatan anggaran. Kompetensi sipil dlm menangani perihal keamanan & pertahanan nasional. Keterwakilan militer dibandingkan dg komposisi masyarakat luas. 	<ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana t.erjadi kudeta militer. Sejauh mana personel militer (aktif & non-aktif) ditunjuk dlm birokrasi sipil. Sejauh mana militer terlibat dlm memberikan keamanan internal. Sejauh mana militer telah menjadi profesional.
	Transparansi & Akuntabilitas Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan atas akuntabilitas pejabat publik. Jaminan atas tersedianya laporan periodik atas kekayaan & aset yg dimiliki pejabat publik. Ada kode etik dlm pelaksanaan pelayanan publik. Adanya sanksi atas kemungkinan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. Jaminan atas kebebasan informasi seputar kinerja, tindakan², & keputusan² pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya institusi independen utk akuntabilitas (IIA). Terjaminnya kemandirian & imparsialitas lembaga IIA tsb. Kecukupan sumber daya utk memenuhi mandat IIA. Kemauan & kapasitas utk menjalankan pengawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat persepsi publik atas kurangnya akuntabilitas. Sejauh mana perkembangan kinerja IIA. Jumlah & lingkup pejabat publik yg mdptk sanksi.
	Supremasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan atas independensi lembaga judisial dari kontrol legislatif & eksekutif. Jaminan atas kesetaraan & keamanan akses thd keadilan. Jaminan atas bantuan hukum bagi warganegara yg kurang mampu. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya sistem peradilan kriminal. Perlakuan yg imparsial & setara dlm sistem pidana. Kapasitas sistem pidana utk mengakomodasi narapidana & tahanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Status kasus² judisial yg tercatat (jumlah kasus tertunda & waktu rata² utk kasus² yg diselesaikan) Kinerja kantor kejaksanaan agung.
	Desentralisasi	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan atas transfer/delegasi kekuasaan & fungsi dari pemerintah pusat ke daerah. Jaminan atas otonomi dr pemerintahan daerah utk melakukan perencanaan & anggaran. Jaminan atas pemilihan pemerintahan lokal melalui pemilihan kompetitif (baik eksekutif maupun legislatif). 	<ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana kontrol atas sumber daya oleh pemerintahan daerah. Adanya pelatihan & pendidikan utk unit pemerintahan daerah. Terbentuknya perangkat utk keterwakilan & partisipasi yg lebih besar dari berbagai kepentingan di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana terdapat batasan bagi pemerintah daerah dlm melaksanakan kekuasaan & fungsi²nya. Sejauh mana terdapat kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat sekitar dlm proses formulasi & implementasi kebijakan.

Bagian ini merupakan versi original dari hasil penilaian kelompok kerja 2004.

CMP	TEMA	DIMENSI LEGAL	DIMENSI INSTITUSIONAL	DIMENSI KINERJA
Masyarakat yg Demokratis atau Sipil	Media yg Independen & Bebas	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan atas independensi media dari kontrol & pengaruh negara. Jaminan atas kepemilikan privat atas media. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya akses thd media bagi publik. Kemampuan & kemauan dr media utk merepresentasikan berbagai alur opini & perspektif. Kemampuan & kemauan utk bertindak sebagai pengawas/ "watchdog" pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana terjadi pelecehan & kekerasan thd media. Sejauh mana terdapat sensor pemerintah atas media. Sejauh mana terdapat pembatas atas kebebasan pers.
	Partisipasi Populer	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan atas eksistensi masyarakat sipil/"civil society" atau LSM, maupun institusi kerelawanan yg independen dr pemerintah. Jaminan atas partisipasi masyarakat sipil atau LSM dlm proses kebijakan. Jaminan atas keterlibatan aktif masyarakat sipil atau LSM dengan aktor2 negara. 	<ul style="list-style-type: none"> Kemauan & sejauh mana partisipasi warganegara dlm LSM & lembaga kerelawanan lainnya. Adanya kejelasan mengenai konstituen yg diwakili oleh LSM atau lembaga kerelawan lain. Sejauh mana terdapat partisipasi dari elemen2 masyarakat sipil yg berbeda (sehubungan dg e/a/r/g/k/ss, dll). 	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan LSM & lembaga kerelawanan lainnya dlm memberikan kontribusi berupa input kritis dlm proses perumusan kebijakan. Sejauh mana terdapat prosedur internal LSM & lembaga kerelawanan lainnya yg demokratis. Sejauh mana terdapat hambatan & batasan dlm partisipasi masyarakat sipil. Sejauh mana terdapat keberagaman sumber pendanaan.